

# KESETARAAN GENDER DAN PENDIDIKAN



**K**ertas Kebijakan ini menyoroti kemajuan signifikan yang dicapai untuk meningkatkan akses dan paritas dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) untuk kesetaraan gender dan pendidikan (Tabel 1). Fokus saat ini terletak pada upaya pengembangan langkah-langkah sistematis yang dapat meningkatkan akses untuk pencapaian hasil 'outcome' mutu pendidikan yang lebih baik, yang lebih responsif gender. Jika disparitas di tingkat propinsi ditangani dengan baik, maka arah untuk pencapaian paritas gender dalam partisipasi murni di semua jenjang pendidikan masih berada pada jalur yang tepat, yang sesuai dengan target MDG yang harus dicapai hingga tahun 2015. Upaya pengarusutamaan gender dalam pendidikan masih menghadapi tantangan. Untuk itu perlu dilakukan penilaian dampak terhadap perempuan dan laki-laki dari setiap kegiatan yang direncanakan, termasuk menyangkut legislasi, kebijakan atau program di semua bidang dan jenjang pendidikan. Program pendidikan yang responsif gender mengintegrasikan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pendidikan.

### Status Saat Ini

**Rasio melek huruf perempuan dan laki-laki telah tercapai pada kelompok usia 15-24 tahun (Target MDG no. 3).**

**B**erbagai program pemerintah seperti Program Sekolah Satu Atap (menyatukan SD dan SMP), Pembangunan 'Sekolah Kecil', Sekolah Satelit di daerah miskin dan terpencil, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa Siswa Miskin, Bantuan Langsung Tunai dan Dana Alokasi Khusus telah berhasil mengurangi hambatan akses terhadap pendidikan. Tahun 2009, Indeks Paritas Gender (IPG) nasional melek huruf untuk kelompok usia 15-24 tahun hampir 100, dengan tingkat melek huruf perempuan sebesar 99,4% dan laki-laki 99,5% (lihat Gambar 1). Namun, di 16 propinsi

tingkat melek huruf untuk perempuan kelompok usia ini masih sedikit dibawah laki-laki, (Bappenas. 2010).

**Disparitas gender antar propinsi masih ditemukan pada jenjang sekolah menengah pertama, menengah atas dan pendidikan tinggi.**

**I**ndonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam kesetaraan gender untuk Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat nasional. Tahun 2009, IPG di sekolah dasar (SD / MI / Paket A) adalah 99,73, sementara di sekolah menengah pertama (SMP/ MTs/Paket B) 101,99, sekolah menengah atas (SMA/ MA/Paket C) 96,16, dan pendidikan tinggi 102,95. Disparitas antar propinsi dan dalam propinsi yang sama tetap ada (lihat Gambar 1 dan 2). Data Susenas



# KERTAS KEBIJAKAN 3

Penyelenggaraan program pendidikan non-formal (paket A, B dan C) oleh pemerintah terutama untuk anak yang tidak bersekolah (putus sekolah dan yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal), penting untuk mempercepat pencapaian tujuan MDG di bidang pendidikan dasar. Namun demikian, cakupan dan mutu program ini masih bermasalah. Tidak ada analisa yang menunjukkan manfaat program bagi anak perempuan maupun laki-laki dan analisa mengenai penanganan kesenjangan gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

**Angka transisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan di semua jenjang pendidikan di sebagian besar propinsi.**

Angka transisi dari SD ke SMA anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Data tingkat propinsi menunjukkan bahwa 11 propinsi memiliki kesenjangan paritas gender yang sangat signifikan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10-23% lebih tinggi untuk anak laki-laki. Ada 4 propinsi di mana angka transisi anak perempuan mencapai 4% lebih tinggi dibanding laki-laki dan satu propinsi di mana angka transisi anak perempuan hampir 48% lebih tinggi dibanding laki-

laki. Data tingkat propinsi menunjukkan bahwa di 31 propinsi, anak laki-laki memiliki angka transisi SMP ke SMA yang lebih tinggi. Ada kesenjangan gender yang signifikan di 16 propinsi, dengan yang tertinggi ditemukan di Papua Barat, dimana lebih dari 38,3% anak laki-laki melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Ini diikuti oleh Kepulauan Riau dimana lebih dari 20,7% anak laki-laki melanjutkan sekolah dibandingkan anak perempuan. Sebaliknya, propinsi Gorontalo mempunyai 9,9% lebih banyak anak perempuan yang melanjutkan sekolah ke SMA, (Kemendiknas, Biro Perencanaan, 2009).

**Kurangnya penelitian di tingkat propinsi untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan transisi anak laki-laki atau perempuan ke jenjang pendidikan berikutnya.**

Penelitian dibutuhkan untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Salah satu studi yang berdasar pemetaan terhadap 2.126 sekolah (Program LAPIS AusAID), menunjukkan bahwa angka transisi ke jenjang yang lebih tinggi jauh lebih rendah (sekitar 20,3% poin) pada anak perempuan yang selesai di madrasah tingkat menengah dibanding di madrasah tingkat dasar. Studi ini juga menunjukkan bahwa anak perempuan yang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya berkorelasi terhadap aspek-aspek penting dari mutu sekolah. Aspek-aspek tersebut adalah kualifikasi guru yang

**Boks 1: Adat masih mempengaruhi akses anak perempuan terhadap pendidikan**

*Di NTT, jika seorang gadis pergi ke sekolah diluar daerahnya dan tinggal di rumah kos tanpa didampingi, maka harga mas kawinnya, atau 'belis' akan turun, karena reputasinya akan tercemar akibat adanya anggapan bahwa ia tidak lagi "murni". Selain isu yang berkaitan dengan adat, anak perempuan juga menghadapi bias gender di mana orang tua masih memprioritaskan pendidikan bagi anak laki-laki.*



# KERTAS KEBIJAKAN 3

lebih tinggi, ketersediaan materi dan peralatan lain untuk mendukung proses pembelajaran siswa dan ketersediaan toilet terpisah untuk anak perempuan dan anak laki-laki, (Austen et al, 2009). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan faktor-faktor terkait kualitas sekolah akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan angka transisi dan angka retensi sekolah anak perempuan.

**Program pemerintah telah berhasil mengurangi hambatan akses terhadap fasilitas sekolah untuk perempuan dan laki-laki, tetapi ada hambatan yang signifikan dalam menyelesaikan pendidikan berkualitas yang responsif gender.**

**D**ata Susenas 2009 menyoroti tanggapan yang responsif gender yang diberikan oleh populasi usia 7-18 tahun terkait alasan putus sekolah. Kurangnya kemampuan menjadi masalah utama bagi laki-laki, dengan 10,78% di antaranya mengatakan bahwa mereka putus sekolah untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, dibanding 8,69% perempuan. Adat masih merupakan faktor kuat yang mempengaruhi akses (lihat Boks 1) dan pernikahan dini masih menjadi penghalang utama. Sebanyak 6,07% perempuan menjadikan ini sebagai alasan putus sekolah dibanding 0,14% laki-laki. Prevalensi pernikahan dini dapat ditemukan di Indramayu, Jawa Barat dan di beberapa kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Peraturan terkait dukungan sekolah terhadap perempuan usia sekolah yang sudah menikah, hamil atau ibu-ibu muda, tidak jelas. Jarak sekolah, permasalahan keselamatan dan biaya terkait perjalanan jarak jauh juga menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan bagi lebih dari 0,32% perempuan dibanding 0,66% laki-laki di kota dan 4,18% perempuan dibanding 3,98% laki-laki di wilayah perkotaan dan terutama di pedesaan,

(BPS-Susenas, 2009). Terbatasnya fasilitas sanitasi yang terpisah bagi perempuan, yang dibutuhkan untuk keperluan menstruasi berpengaruh terhadap kerutinan kehadiran di sekolah. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa adanya toilet terpisah di Madrasah menaikkan angka transisi anak perempuan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan rata-rata 5 persen poin, dibanding sekolah-sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut, (Austen et al, 2009).

**Kurangnya metode dan materi belajar-mengajar yang responsif gender masih menjadi permasalahan.**

**I**nstitut Pendidikan Tenaga Kependidikan yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga guru yang memiliki pemahaman terhadap kebutuhan khusus dari kedua jenis kelamin. Belum ada rancangan dan penggunaan materi dan rencana belajar-mengajar yang responsif gender; bahasa yang peka gender dalam kelas, pengaturan kelas dan sistem manajemen sekolah. Semua ini dibutuhkan untuk menciptakan praktek pengajaran yang mendukung perlakuan dan partisipasi yang sama antara anak perempuan dan laki-laki di dalam kelas, saat kegiatan ekstra kurikuler dan di komunitas sekolah yang lebih luas. Materi pengajaran belum sepenuhnya memenuhi standar kesetaraan gender. Meskipun Kemendiknas telah bertahun-tahun mengangkat permasalahan ini, namun, perlu diakui bahwa buku kurikulum masih tetap bias gender sehingga memperkuat stereotip peran perempuan dan laki-laki: "*Sudah lama diketahui bahwa materi pendidikan kita bias gender*," Ace Suryadi, Ketua Komite Kerja Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pendidikan Nasional, (Jakarta Post, 10 Maret 2008).



# KERTAS KEBIJAKAN 3

## Disparitas kualifikasi dan rasio gender guru dan kepala sekolah.

Rasio guru perempuan terhadap laki-laki mencapai 50% atau lebih di semua propinsi kecuali Papua, Bali, NTB dan Papua Barat. Jumlah tertinggi guru perempuan ditemukan di Sumatra Barat (75,8%) dan terendah di Papua (45,2%), (Situs Web Kemendiknas). Dari jumlah total 1,65 juta guru perempuan, 57% di antaranya merupakan pegawai negeri, dibanding 66% dari 1 juta guru laki-laki. Kualifikasi guru belum mencapai kesetaraan gender. 39% guru perempuan memiliki minimal kualifikasi gelar sarjana atau diploma dibanding 48% guru laki-laki (Kemendiknas, PMPTK, 2009). Pada tingkat SD, 33% kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta adalah perempuan, dan pada tingkat SMP menurun menjadi 14% dan SMA 12%, (Situs Web Kemendiknas). Kurangnya kepala sekolah perempuan bisa menjadi kendala dalam mempertahankan kesetaraan gender, khususnya di SMP. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kehadiran seorang kepala sekolah perempuan berkorelasi kuat dengan tingginya tingkat partisipasi dan transisi perempuan ke jenjang menengah. Suatu studi yang dilakukan di Indonesia menyimpulkan bahwa kualifikasi guru memiliki hubungan positif pada proporsi dan transisi siswa perempuan ke jenjang berikutnya di sekolah-sekolah Islam. Peningkatan satu unit dari proporsi guru yang memiliki gelar di suatu sekolah dikaitkan dengan peningkatan sebesar 8,7 persen poin pada proporsi anak perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, (Situs Web Kemendiknas).

## Rendahnya pengarusutamaan gender di sekolah-sekolah Islam yang proporsi siswa perempuannya lebih tinggi.

Mengingat bahwa lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang bersekolah di SMP dan SMA madrasah, dimana 48,5% perempuan

di MI, 50,8% di MTs, dan 54,3% di MA pada tahun 2008/2009, maka program peningkatan kualitas di Madrasah dan pelatihan pengarusutamaan gender bagi kader pendidik perempuan dan laki-laki agar mereka memiliki perspektif gender, akan memberikan kontribusi pada upaya kesetaraan gender dan penurunan kesenjangan ekonomi, karena sekolah-sekolah ini menerima banyak siswa miskin.

Untuk mengatasi struktur patriarki yang masih dominan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, dibutuhkan pedoman dan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di semua jenjang pendidikan. Pemerintah tengah merumuskan pedoman pengarusutamaan gender untuk Madrasah, yang harus disebar-luaskan dan ini membutuhkan pengembangan kapasitas di semua tingkat untuk memastikan pelaksanaannya. Untuk itu, harus diperhitungkan perlunya interpretasi ajaran Islam yang menggunakan perspektif gender atau bahkan perspektif perempuan yang lebih terbuka. Interpretasi ini perlu dimasukkan dalam kurikulum dan buku teks, dan/atau instrumen politik yang digunakan untuk tujuan memfasilitasi tercapainya



# KERTAS KEBIJAKAN 3

aspek-aspek tersebut. Semua Pusat Studi Wanita IAIN/UIN menekankan pentingnya penggunaan pendekatan gender dalam studi mengenai Islam dan berkomitmen untuk menggunakan hasilnya untuk mereformasi kurikulum dan buku teks. Terbatasnya pendanaan menghambat dilakukannya lebih banyak inisiatif penelitian yang inovatif dan kegiatan pengarusutamaan gender lainnya di tingkat pendidikan tinggi, (Kull, 2009). Sebagai contoh, sudah banyak buku teks yang menggunakan perspektif gender diproduksi bagi siswa perguruan tinggi jurusan studi Islam di UIN Jakarta. Namun, buku-buku ini tidak dicetak karena kurangnya dana. Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogyakarta merekomendasikan perumusan kebijakan yang jelas, yang mengatur pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dalam setiap kegiatan, termasuk dalam posisi kepemimpinan, manajemen dan akademik. Mereka menekankan perlunya memasukkan perspektif gender secara eksplisit dan implisit dalam kurikulum serta pelatihan bagi semua guru yang melaksanakan pengarusutamaan gender, (Kull, 2009).

## Permasalahan Kebijakan

Pengarusutamaan gender di Kementerian diamanatkan melalui Keputusan Presiden no. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Kemendiknas merupakan salah satu Kementerian yang pertama kali dilibatkan dalam pengembangan rencana pengarusutamaan gender dan penunjukkan *focal point* gender. Tahun 2005 dihasilkan dokumen yang berisi ketentuan pengarusutamaan gender, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 84/2008 untuk sektor ini. Kantor Kepresidenan dan Kemendiknas menghasilkan kerangka legislasi dan peraturan yang komprehensif, termasuk Keputusan Presiden khusus untuk pemberantasan buta aksara dan pencapaian 9 tahun pendidikan dasar bagi semua

anak, yang berdasar pada Undang Undang Pendidikan Nasional No. 20/2003 yang telah direvisi.

Masih diperlukan analisa untuk mengetahui apakah konteks kebijakan ini sudah cukup untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dengan berhasil. Juga masih diperlukan asesmen tentang peluang dan kendala di tingkat kebijakan. Instrumen perencanaan kebijakan seperti pemetaan sekolah yang dilakukan secara partisipatif dan kualitatif, dan survei tingkat kepuasan orangtua terkait akses, kualitas dan dampak pada retensi dan transisi anak perempuan dan laki-laki, dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pengembangan sumberdaya selanjutnya. Kajian perlu juga ditujukan untuk melihat bagaimana pandangan orangtua berpengaruh pada angka putus sekolah dan kinerja mereka di sekolah dan ini dapat menjadi masukan untuk persiapan kampanye yang ditujukan bagi peningkatan kesadaran orang tua. Sebagai contoh, pemetaan sekolah dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kemendiknas dan UNICEF sementara survei kepuasan dilaksanakan di Kabupaten Indramayu oleh Bappenas bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, yang didukung oleh program PRMAP ADB.

Kesetaraan gender dinyatakan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Meskipun tidak ada target gender yang spesifik, pengarusutamaan prioritas pendidikan dalam RPJM 2010-2014 harus didukung oleh analisa gender yang sistematis. Analisa menyangkut antara lain:



a) Peningkatan angka rata-rata tetap sekolah siswa usia 15 tahun keatas; b) Penurunan tingkat buta aksara populasi usia 15 keatas; c) Peningkatan APM di SD; d) Peningkatan APM di SMP; e) Peningkatan angka partisipasi kasar di SMA; f) Peningkatan angka partisipasi kasar di universitas kelompok usia 19-23 tahun, dan g) Penurunan kesenjangan dalam partisipasi dan mutu pelayanan pendidikan.

Peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran (20%) mencerminkan komitmen Pemerintah terhadap upaya perbaikan pendidikan. Inisiatif penting yang dilakukan pada tahun 2010 adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No.119/2009 tentang pelaksanaan anggaran responsif gender di tujuh instansi pemerintah, termasuk Kemendiknas. Propinsi yang kaya sumberdaya bisa mempercepat kemajuan dengan menyediakan dana pendamping untuk program-program pemerintah yang ada, seperti beasiswa bagi siswa perempuan dan laki-laki miskin untuk menghilangkan disparitas gender (APM, putus sekolah dan transisi) di kabupaten/kota yang membutuhkannya. Untuk kabupaten/kota yang miskin sumberdaya, perlu dipertimbangkan perumusan strategi beasiswa dan perluasan sumberdaya.

## Rekomendasi

- Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPPA) mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan.
- Kemendiknas mengkaji kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri No. 84/2008

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di tingkat sekolah dan kabupaten/kota dan untuk memperkuat pelaksanaan Keputusan Menteri yang bertujuan mencapai pendidikan yang responsif gender dengan pengembangan kapasitas di semua tingkatan dalam sistem pendidikan.

- Kemendiknas dan Kemenag melakukan penilaian terhadap sejumlah sekolah sampel di beberapa lokasi geografis yang berbeda tentang cara-cara pengintegrasian kebijakan gender dalam rencana dan pelaksanaan manajemen sekolah.
- Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dengan menggunakan perspektif gender, Peraturan Pemerintah tentang Anggaran propinsi dan kabupaten/kota, dan Peraturan Kemendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan No. 119/2009 tentang Anggaran responsif gender.
- Kemendiknas dan Kemenag memberikan lebih banyak perhatian pada propinsi yang belum berhasil dalam menurunkan rasio paritas gender, transisi dan angka putus sekolah, dengan membuat rancangan strategi berdasar kebutuhan yang ada, dengan memperhitungkan faktor-faktor dasar yang berkontribusi terhadap rendahnya pencapaian indikator di propinsi dan kabupaten/kota.
- Kemendiknas mempercepat program pelatihan yang ada untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan data terpilah berdasar gender, analisa dan perencanaan dan penganggaran responsif gender di tingkat propinsi dan kabupaten/kota untuk indikator tertentu.
- Mempercepat program yang ada yang terkait akses pendidikan dan memprioritaskan propinsi yang memiliki kesenjangan paritas gender yang signifikan dalam indikator pendidikan. Ini termasuk Program Sekolah Satu Atap (gabungan SD

& SMP), Sekolah Kecil, Sekolah Satelit di daerah miskin dan terpencil dan program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat. Meningkatkan cakupan dan kualitas program pemerataan (Paket A, B dan C), khususnya jika disparitas rasio gender terjadi pada angka putus sekolah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Perlu juga dilakukan kajian untuk melihat efektifitas skema yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan gender.

- Mengembangkan kebijakan dan mensinkronisasinya di tingkat nasional, daerah dan sekolah untuk memastikan bahwa perempuan yang menikah dini, hamil dan ibu muda bisa melanjutkan pendidikan. Melaksanakan kampanye untuk membangun kesadaran akan pentingnya mengurangi insiden pernikahan dini dan mendorong kelangsungan pendidikan bagi laki-laki, dan apalagi perempuan, yang menikah dini.
- Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK perlu mengkaji kurikulum pelatihan guru untuk memperbaiki penyusunan materi dan keterampilan mengajar sehingga responsif gender.
- Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dan meningkatkan penyediaan buku teks pelajaran yang peka gender pada semua tingkat pendidikan, termasuk teks, gambar dan akses yang sama terhadap kegiatan ekstra-kurikuler olahraga, seni dan sains.
- Kemendiknas memastikan mekanisme pembiayaan pendidikan bersifat responsif gender. Misalnya, ketika membiayai infrastruktur dan rehabilitasi sekolah baru, dan merancang bangunan sekolah, maka harus memenuhi kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan. Di SMP dan SMA, perlu ada fasilitas sanitasi yang terpisah dan memadai bagi perempuan, untuk keperluan terkait menstruasi.
- Kemendiknas dan Kemenag merumuskan kebijakan yang jelas, yang mengatur penempatan laki-

laki dan perempuan yang memenuhi kualifikasi di semua kegiatan pendidikan (termasuk pendidikan Islam), terutama dalam posisi kepemimpinan, manajemen, dan akademik di semua tingkatan pendidikan (sistem sejenis sudah terlaksana di lapangan dengan adanya perwakilan dalam partai politik dan parlemen).

**Tabel 1:** Tujuan MDG 3: Mendorong Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015				
Rasio anak perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, sekunder dan tersier				
Indikator	Data dasar (1993)	Saat ini (Susenas 2009)	Target 2015	Status
Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di SD	100,27	99,73	100,00	Tercapai
Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di SMP	99,86	101,99	100,00	Tercapai
Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di SMA	93,67	96,16	100,00	Sesuai rencana
Rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di jenjang pendidikan yang lebih tinggi	74,06	102,5	100,00	Tercapai
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki berumur 15-24 tahun	98,44	99,85	100,00	Tercapai

## Referensi

- Austen, S, Edwards, J and Sharp, R (2009), *'Funding quality improvements in girls' education in Islamic schools in Indonesia'*, in Lynne Chester, Michel Johnson and Peter Kriesler (eds), *Heterodox economics' visions. Australian Society of Heterodox Economists 8th Annual Conference*, University of New South Wales, Sydney, pp 29–45. Data dianalisa dari survei sekolah proyek LAPIS yang didanai AusAID, Indonesia.
- Bappenas (2010), *"Laporan Pencapaian MDG Indonesia"*.
- Biro Pusat Statistik, (2009), *"Statistik Pendidikan"*, Susenas BPS, 2009
- Kull, A (2009), *"At the Forefront of a Post-Patriarchal Islamic Education, Female Teachers in Indonesia"*. Journal of International Women's Studies. Vol 11 #1, Nov. 2009
- Jakarta Post (2008), 10 Maret 2008
- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), *"Analisis Data Guru"*, PMPTK, 2009
- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), *"Educational Indicators in Indonesia 2007/2008"*, p. 74
- Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), *"Data Capaian Indikator MDG"*, Biro Perencanaan, 2009
- Situs Web Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), *"Data Pendidikan 2008/09"*.
- Situs Web Kementerian Agama (Kemenag), *"Tabel Statistik Pendidikan Madrasah 2008/2009"*.